



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 16 Tahun 2007

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu pengaturan mengenai jabatan fungsional;
 - b. bahwa pengaturan mengenai jabatan fungsional sebagaimana termaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembinaan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor 5 Seri D);
19. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Inspektorat Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor 6 Seri D);
20. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor 7 Seri D);
21. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kecamatan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor 8 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Instansi Pembina adalah Departemen/Lembaga Non Departemen yang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabatan Fungsional.
6. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.
7. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan atau Jabatan Fungsional Keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
8. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah Rumpun Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
9. Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.
10. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
11. Bobot jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan.
12. Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Instansi Pembina adalah Departemen/Lembaga Non Departemen yang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabatan Fungsional.
6. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.
7. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan atau Jabatan Fungsional Keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
8. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah Rumpun Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
9. Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.
10. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
11. Bobot jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan.
12. Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi.

13. Kualifikasi teknisi atau penunjang profesional adalah kualifikasi yang bersifat pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi melatihkannya dan terikat pada etika profesi.
14. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi
15. Mutasi Jabatan adalah segala perubahan jabatan fungsional seseorang Pegawai Negeri Sipil,
16. Beban kerja adalah jumlah produk yang harus dihasilkan atau waktu yang diperlukan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi sesuai misi organisasi.
17. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
18. Tunjangan Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut dengan tunjangan jabatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Kategori Rumpun Jabatan Fungsional

Pasal 3

Jabatan-jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional dikategorikan dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan.

**Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Keahlian**

Pasal 4

- (1) Syarat jabatan fungsional keahlian yaitu Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berjazah Sarjana (S-1).
- (2) Kegiatan jabatan fungsional keahlian meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (3) Jabatan fungsional keahlian dalam melaksanakan tugasnya terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesiya.
- (4) Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :
 - a. Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e);
 - b. Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda(IV/c);
 - c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);
 - d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d).

**Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional Keterampilan**

Pasal 5

- (1) Syarat jabatan fungsional keterampilan yaitu Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis operasional dan atau penunjang operasional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3).
- (2) Kegiatan jabatan fungsional keterampilan meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi.
- (3) Jabatan fungsional keterampilan dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan etika tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesiya.

- (4) Berdasarkan penilaian bobot Jabatan Fungsional maka jabatan fungsional keterampilan dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu :
- Jenjang Penyelia, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan penunjang keangkatan mulai dari Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);
 - Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan keangkatan mulai dari Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan keangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d);
 - Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan keangkatan Pengatur Muda (II/a).

BAB IV FORMASI JABATAN FUNSIONAL

Pasal 6

- Bupati menetapkan formasi jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja SKPD selaku pengguna jabatan fungsional serta kemampuan keuangan daerah.
- Tata laksana penetapan formasi jabatan fungsional dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI MUTASI JABATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan

Pasal 7

- Bupati menetapkan pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam

Pasal 8

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan kenaikan jenjang jabatan fungsional sesuai prestasi kerja pejabat fungsional yang dinilai berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Angka Kredit serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata laksana penilaian angka kredit jabatan fungsional dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tim Penilai Angka Kredit

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari pejabat-pejabat fungsional dan dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian yang mempunyai jabatan serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional yang dinilai.
- (2) Susunan, kedudukan, tugas dan fungsi Tim Penilai Angka Kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila pemerintah daerah belum dapat membentuk tim penilai dengan pertimbangan keterbatasan calon anggota tim penilai yang memenuhi persyaratan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada tim penilai angka kredit tingkat provinsi atau intansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Bagian Keempat Tunjangan Jabatan

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan mendapatkan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Jenis dan jenjang jabatan fungsional yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai jabatan fungsional, dinyatakan tidak berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Padalarang
pada tanggal 17 Desember 2007



Diundangkan di Padalarang
Pada tanggal 17 Desember 2007

